

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Neneng Bertahan Menunggu Kompensasi

Pancoran, Warta Kota

Pemprov DKI Jakarta membebaskan lahan dengan total 40 rumah di bantaran kali Ciliwung, Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan sekira enam bulan lalu.

Rencananya, lahan yang dibebaskan itu bakal digunakan untuk pelebaran kali Ciliwung supaya warga sekitar tak lagi merasakan banjir.

Neneng mengaku lahannya belum dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta sehingga ia tetap bertahan di dalam rumah.

"Saya belum dibayar sama Pemprov jadi belum mau pindah," katanya kepada Warta Kota Senin (8/5/2023).

Menurut Neneng, rumahnya memiliki luas 100 meter lebih dan sesuai dengan perhitungan maka Pemprov harus membayar Rp 2,1 miliar.

Namun, sampai saat ini belum ada negosiasi dari pihak Pemprov DKI terkait rumahnya untuk dibebaskan.

"Ya kalau sudah dibayar

enggak tahu mau pindah ke mana," terangnya.

Neneng tidak memiliki kampung karena ia merupakan warga asli Jakarta dan sudah turun menurun tinggal di sana.

Sehingga, kalau dibebaskan tanpa dapat kompensasi dari Pemerintah ia bisa menjadi gelandangan.

"Kalau dibayarkan kemungkinan bakal beli rumah, tapi kan ini belum dibayarkan yang lain sudah," tegasnya.

Sementara itu Ngadiono (58) warga yang lahannya telah dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta di bantaran kali Ciliwung, Rawajati, kini telah pindah ke Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Ia mendapatkan uang miliaran rupiah setelah rumahnya digusur akhir tahun 2022 silam.

Menurutnya, pengusuran terhadap lahan di bantaran kali ini sudah direncanakan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tahun 2019 lalu.

Namun, negosiasi yang berja-

lan alot, Pemprov butuh waktu sekira empat tahun untuk bisa bebaskan lahan tersebut.

"Sudah direncanakan tahun 2019 dari zamannya Pak Anis, pembongkaran sudah dilakukan sekira 5 sampai 6 bulan yang lalu," katanya Senin (8/5/2023).

Menurutnya, 42 rumah pemegang SHM sudah diratakan oleh Pemprov DKI dan 19 rumah masih berdiri karena non SHM.

Ngadiono mengaku, belasan rumah itu tetap bertahan karena belum dinayarkan dan rata-rata sudah tinggal puluhan tahun.

"Mereka semua ini sudah tinggal di sini selama 20 sampai 25 tahun dan seperti Ibu Wati non sertifikat rumahnya ini warisan dari orang tuanya," terangnya.

Ngadiono tidak mengetahui kapan batas waktu pembebasan lahan itu dilakukan oleh Pemrov DKI.

Namun, ia terus berkomunikasi dengan Dinas Sumber Daya Air agar tetangganya mendapatkan uang pengusuran. (m26)